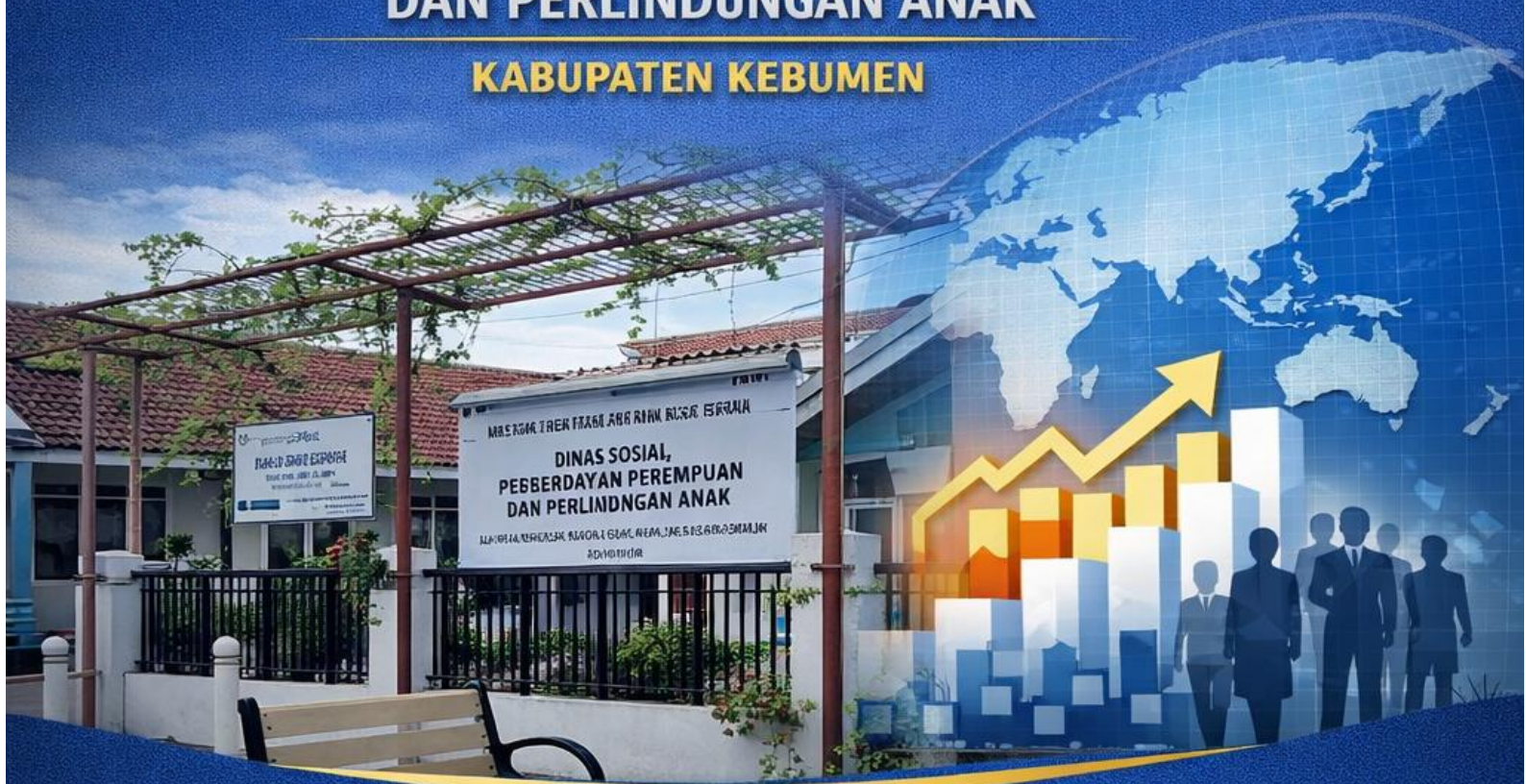




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**



Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381518, Faksitaila (0287) 381989

Laman: www.dinsospsa.kebumenkab.go.id

Pos-el: dinsospsa@kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, sekaligus merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Harapannya, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perumusan kebijakan, strategi, dan peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target pembangunan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, semoga laporan ini memberikan manfaat dan menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah ini.

Kebumen, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Yunita Prasetyani, SE, MA, M.Ec.Dev.
NIP. 197306141999032003
Pembina Tingkat I - IV/b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	6
1.2. Fungsi Strategis.....	11
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisai Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	84
4.2. Permasalahan/Kendala	85
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	8
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	8
Tabel 1.4	Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ...	10
Tabel 1.5	Komponen Penilaian AKIP	13
Tabel 1.6	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
Tabel 2.2	Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	22
Tabel 2.5	Dukungan Anggaran Perubahan Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja SPM Sosial Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Rekapitulasi Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	31
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025	32

Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	36
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi dan Nasional	39
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Atas Capaian Realisasi Kinerja	44
Tabel 3.9	Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	49
Tabel 3.10	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)	52
Tabel 3.11	Keterkaitan Sasaran Dan Program/Kegiatan	56
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	64
Tabel 3.13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per 31 Desember 2025	78
Tabel 3.14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Jenis Layanan Per 31 Desember 2025	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas setiap perangkat daerah dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Adapun dasar hukum penyusunan antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyajikan informasi kinerja secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja;
3. Menjadi alat evaluasi dan bahan pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan kinerja, serta peningkatan kualitas program di tahun berikutnya;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen didukung oleh sumber daya manusia yang terus berkembang dengan komposisi sebagaimana tersaji berikut:

Table 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	3	2	5
4	D1-D3	-	3	3
5	S1	4	13	17
6	S2	2	4	6
JUMLAH		9	22	31

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1 tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Golongan	Jumlah Personil
1	PPPK Golongan IX	4
2	PPPK Golongan VII	1
3	PPPK Golongan V	3
4	Golongan II/c	3
5	Golongan II/d	1
6	Golongan III/a	6
7	Golongan III/b	1
8	Golongan III/c	1
9	Golongan III/d	4
10	Golongan IV/a	5
11	Golongan IV/b	2
	Jumlah	31

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Table 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	7
2	Fungsional tertentu	12
3	Fungsional umum	12
	Jumlah	31

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta diperjelas dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

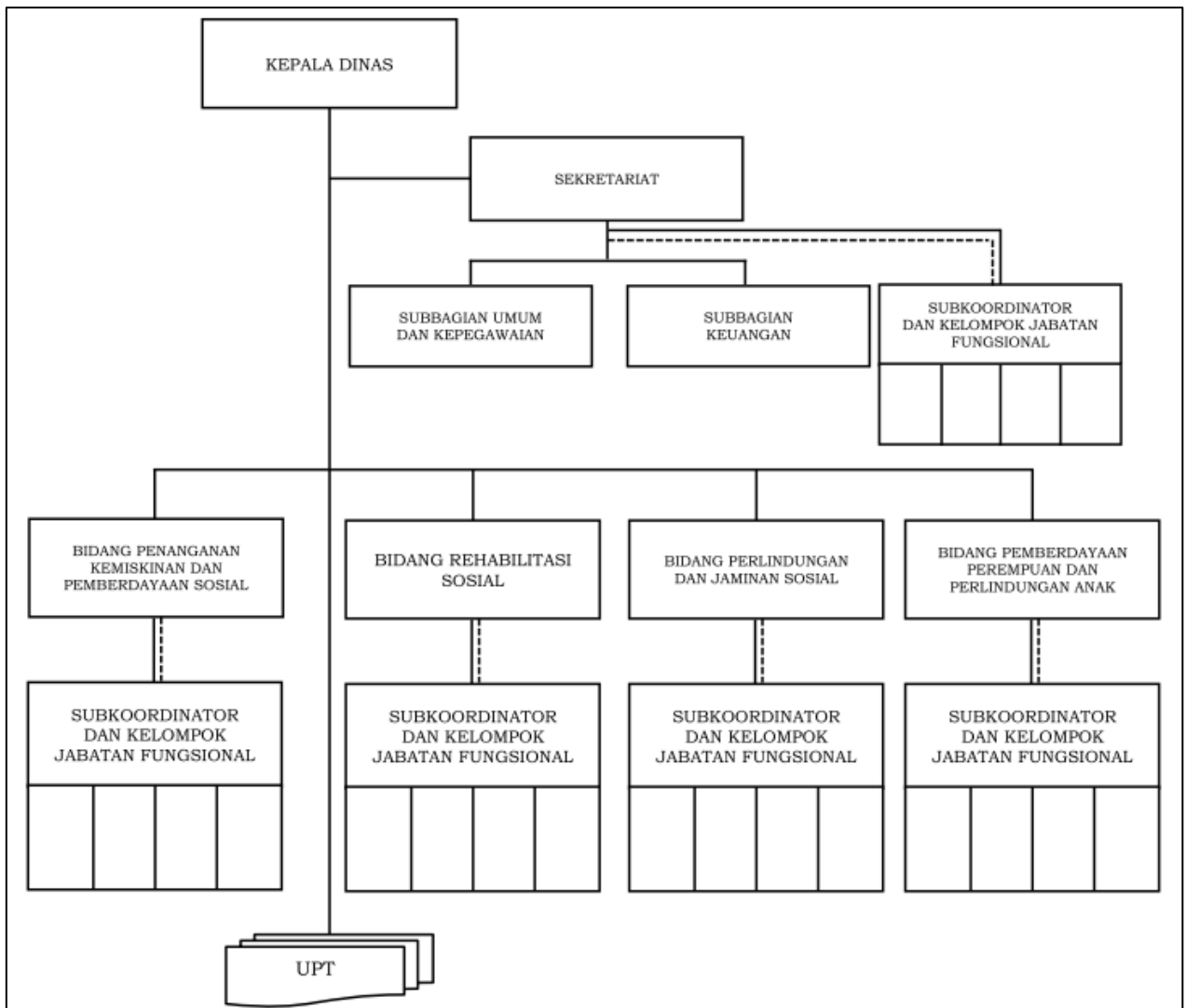
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, diperlukan pembentukan struktur organisasi yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pelayanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Struktur organisasi ini disusun agar organisasi dapat berfungsi secara efektif, terarah, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun susunan struktur organisasi yang dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan FungsionalMasing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan layanan sosial, serta mendukung penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih optimal. Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.4

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sumber: Perbup No. 116 Tahun 2021

1.2. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada visi daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”* tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pada misi ke-2 yaitu *“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar*

lainnya” dan misi ke-3 yaitu “*Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan*”. Hal ini didukung dengan adanya program prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif serta Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara garis besar merujuk pada tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka fungsi strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan layanan sosial dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk menjalankan fungsi strategis tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung beberapa bidang pelaksana kegiatan yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing bidang menjalankan beberapa program antara lain:

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Program penanganan bencana
 - b. Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan
2. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
 - a. Program pemberdayaan sosial
 - b. Program perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Program pengelolaan taman makam pahlawan
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Program rehabilitasi sosial
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Program perlindungan perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
- c. Program peningkatan kualitas keluarga
- d. Program pengelolaan system data gender dan anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program perlindungan khusus anak

Sedangkan dalam pelaksanaan program tersebut, kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan kepada:

1. Penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana dan diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana;
2. Pengelolaan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi) yang termutakhir dan pemberian kegiatan bimbingan sosial terhadap keluarga fakir miskin;
3. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) terlantar di luar panti;
4. Penguatan kapasitas PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
5. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
6. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program kegiatan yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Permasalahan pada Urusan Sosial adalah:

- a. Kondisi bencana tidak dapat diprediksi dan menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen;
 - b. Masih banyaknya sumber data yang dikelola untuk penanganan kemiskinan;
 - c. Penerima Manfaat (PM) merupakan kelompok rentan sehingga menimbulkan resiko penggantian PM;
2. Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
 - b. Masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Kebumen.

1.4. Tindak Lanjut atas LHE AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh nilai 71,50 yang termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Komponen Penilaian AKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
	Total Nilai		71,50

Adapun yang menjadi tindak lanjut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Data Dukung
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan dalam E-Semarak, Esr Menpan secara tepat waktu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melaksanakan publikasi dokumen Perencanaan dalam E-Semarak, Esr Menpan secara tepat waktu	https://bit.ly/TL-LHE2025
2	Memperbaiki dokumen RKT/Renja agar indikator kinerja pada RKT/Renja selaras dengan IKU	Memperbaiki dokumen RKT agar indikator kinerja pada RKT selaras dengan IKU (dokumen terlampir)	
3	Membuat Rencana Aksi secara spesifik menyebutkan satuan/jumlah aktivitas per triwulan dalam mencapai sasaran/target kinerja	Memperbaiki Rencana Aksi secara spesifik menyebutkan satuan/jumlah aktivitas per triwulan dalam mencapai sasaran/target kinerja (dokumen terlampir)	
4	Dalam melakukan pengukuran kinerja per triwulan agar menyajikan data program/kegiatan, sub kegiatan, anggaran, output, uraian aktivitas, satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggung jawab, link bukti dukung dan juga faktor penghambat dan pendukung keberhasilan	Memperbaiki Pengukuran Kinerja Triwulan I yang menyajikan data program/kegiatan, sub kegiatan, anggaran, output, uraian aktivitas, satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggung jawab, link bukti dukung dan juga faktor penghambat dan pendukung keberhasilan (dokumen terlampir)	
5	Memperbaiki dokumen LKJIP Tahun 2024 pada indikator sasaran "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak" yaitu: Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar selaras dengan IKU.	Memperbaiki dokumen LKJIP Tahun 2024 pada indikator sasaran "Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak" yaitu : Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak agar selaras dengan IKU (dokumen terlampir)	

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Data Dukung
6	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar target yang direncanakan dapat tercapai	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar target yang direncanakan dapat tercapai. Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah: a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 sebesar 15,71% dari target 14,00-15,00 dengan capaian kinerja 95,26%. Angka tersebut merupakan rilis angka kemiskinan BPS. Dalam penanganan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan dalam melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun program gulkin yang dijalankan oleh Dinsos P3A adalah sebagai berikut: 1) Pemutakhiran data kesejahteraan sosial setiap periode untuk penetapan data penerima bantuan sosial; 2) Penyaluran bansos permakanan dan sandang untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis; 3) Penyaluran bantuan paket sembako kedaruratan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan; 4) Penyaluran bansos sembako bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi); 5) Penyaluran bantuan uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- untuk akses pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas berat; 6) Penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas; 7) Penyediaan permakanan dan sandang bagi eks psikotik yang tinggal di Rumah Singgah Dosaraso.	

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Link Data Dukung
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2024 sebesar 93,41% dari target 93,45 dengan capaian kinerja 99,95%. Angka tersebut merupakan rilis angka BPS. Strategi pembangunan gender di Kabupaten Kebumen adalah dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diwujudkan melalui pengintegrasian gender dalam setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan di semua perangkat daerah dan lembaga. Adapun program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Dinsos P3A adalah sebagai berikut:	
		1)	Memberikan fasilitasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;	
		2)	Melakukan pelayanan terhadap aduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;	
		3)	Melaksanakan Bimbingan Teknis PPRG (Perencanaan Pembangunan Responsif Gender) bagi Perangkat Daerah tingkat Kecamatan dan Kabupaten;	
		4)	Melaksanakan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten;	
		5)	Melaksanakan rapat koordinasi pokja Pengarusutamaan Gender (PUG);	
		6)	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis ARG (Anggaran Responsif Gender);	
		7)	Melaksanakan rapat koordinasi Focal Point Gender Kabupaten Kebumen;	
		8)	Melaksanakan rapat forum Jejak Gender Walet Kebumen;	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen perencanaan jangka menengah suatu instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, serta arah kebijakan untuk kurun waktu 5 tahun.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Adapun untuk misi pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Misi ke-2, *“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”*
 - b. Misi ke-3, *“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”*
2. Untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, ditetapkanlah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dengan indikator-indikator kinerjanya. Selengkapnya target indikator kinerja sasaran strategis ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50	
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak		Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	93,15	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65	
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode perencanaan 2021–2026.

Tujuan pertama yaitu berkurangnya penduduk miskin dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan dengan target penurunan pada Tahun 2025 menjadi 13,50%-14,00%. Penetapan target penurunan kemiskinan ini menjadi arah kebijakan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Tujuan kedua yaitu meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target 93,55 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran yang pertama adalah prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dengan target indikator kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahun, termasuk di Tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh program terkait layanan sosial diarahkan untuk memenuhi standar minimal pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki lima (5) jenis pelayanan dasar pada 2 program antara lain Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. Masing-masing pelayanan dasar memiliki indikator capaian kinerja dengan rumus perhitungan yang sudah ditentukan. Adapun untuk target capaian kinerja SPM adalah 100%. Dengan terpenuhinya target SPM, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat serta layanan dasar sosial dapat diakses oleh semua warga terutama kelompok rentan, sehingga tujuan pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan terlindungi dapat terwujud. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x 100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x 100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2025
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlanter di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x 100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang lanjut usia terlanter di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar luar panti x 100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota x 100%	100%

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Sasaran yang kedua adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahun, termasuk di Tahun 2025, yang berarti seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan ditargetkan dapat ditangani secara optimal. Target ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan layanan perlindungan korban dapat berjalan maksimal dan responsif.

Secara keseluruhan, tabel indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, mengurangi kemiskinan, serta memastikan layanan sosial

berjalan sesuai standar pelayanan. Pencapaian target-target tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan kinerja yang paling penting (*key performance indicator*) dalam suatu instansi pemerintah yang secara langsung menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU disusun untuk memantau dan mengevaluasi kinerja utama perangkat daerah dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selain itu IKU disusun dengan mempertimbangkan ketercapaian Visi dan Misi daerah serta arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran (IKU OPD)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	$(\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani}) / (\text{Jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor}) * 100\%$
Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	$(\text{Jumlah prosentase capaian SPM sosial}) / (\text{Jumlah SPM sosial}) * 100\%$

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen komitmen yang memuat tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sebagai dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja kepada pemberi kewenangan. Pada Tahun 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,50 - 14,00
	Sasaran :			
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100,00
	Tujuan :			
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55
	Sasaran :			
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinsos P3A, 2025

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5
Dukungan Anggaran Perubahan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.925.560.000,-	Rp. 4.860.001.680,-
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 188.372.000,-	Rp. 142.467.000,-
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.190.000,-
4	Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.665.779.000,-	Rp. 4.584.893.240,-
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.544.681.400,-	Rp. 5.527.051.400,-
6	Program Penanganan Bencana	Rp. 657.347.000,-	Rp. 583.611.500,-
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 27.535.000,-	Rp. 27.381.750,-
8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 421.385.000,-	Rp. 360.344.000,-
9	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 93.756.000,-	Rp. 74.791.000,-
10	Perempuan Program Peningkatan	Rp. 14.636.000,-	Rp. 10.636.000,-
11	Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem	Rp. 7.415.000,-	Rp. 6.805.000,-
12	Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 252.772.000,-	Rp. 463.041.000,-
13	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 31.646.000,-	Rp. 25.878.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinsos P3A, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah proses dan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sumber daya, dan pelaksanaan program yang dituangkan dalam pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja, sehingga keberhasilan ataupun kendala pelaksanaan dapat diketahui dan menjadi dasar perbaikan kinerja.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tercermin melalui tingkat pencapaian sasaran yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan yang telah direncanakan. Laporan kinerja dilaporkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun proses penyusunan LKjIP telah dilaksanakan melalui *review internal* pada tanggal 13 Januari 2026 yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan diikuti oleh Sekretaris Dinas, semua kepala bidang dan pejabat fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun bukti pelaksanaan kegiatan dan draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKjIP20255>.

Dalam rangka melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagai acuan penilaian. Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	$\geq 85 - 100\%$	Baik
3	$\geq 65 - 85\%$	Cukup
4	$\geq 50 - 65\%$	Kurang
5	Kurang Dari 50%	Sangat Kurang

Agar dapat dilakukan pengukuran kinerja maka dibutuhkan data kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan, berupa indikator *output* maupun indikator *outcome* yang dapat direalisasikan dari masing masing program dan kegiatan. Data kinerja dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang bersumber dari:

- Laporan Target, Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025;

Data terkumpul kemudian disusun dan diolah menjadi data kualitatif maupun kuantitatif dari indikator kinerja suatu sasaran strategis maupun indikator kinerja utama dari sasaran.

Capaian kinerja sasaran diperoleh melalui pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyimpulan hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian atas seluruh indikator kinerja sasaran yang terkait. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung kuantitas dan/atau kualitas keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan maupun program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Tahun

2024). Indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan merupakan indikator yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta DPA Perubahan Tahun 2025.

Sesuai ketentuan, indikator kinerja minimal mencakup indikator keluaran (*output*). Pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen pada tahun pelaporan dilakukan melalui indikator keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan secara formal dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan DPA Perubahan 2025.

- ✚ Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- ✚ Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja dilakukan menggunakan 5 (lima) skala pengukuran dengan mengacu pada tingkat perbandingan antara realisasi dan target. Semakin tinggi realisasi terhadap target berarti menunjukkan semakin tingginya kinerja, sebaliknya

semakin rendah realisasi dari target menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka diperoleh hasil pengukuran capaian kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	13,50-14,00	13,58	101,25	Sangat Baik
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	%	100	100	100	Baik
Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak		Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	93,55	93,41*	99,85	Baik
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100	Baik

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

*) realisasi (sementara) angka capaian Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukkan hasil yang

secara umum berada pada kategori **baik hingga sangat baik**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Indikator tingkat kemiskinan merupakan indikator negatif, di mana semakin rendah nilai realisasi menunjukkan semakin baik kinerja. Target Tahun 2025 ditetapkan pada rentang **13,50%–14,00%**, dengan realisasi sebesar **13,58%**. Perolehan angka ini bersumber dari Rilis BPS sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Berdasarkan perhitungan indikator negatif, capaian kinerja mencapai **101,25%** dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan melalui program perlindungan dan pemberdayaan sosial telah memberikan hasil yang melampaui target yang ditetapkan. Semakin banyak penduduk yang **mampu memenuhi kebutuhan dasar** baik pangan maupun nonpangan, daya beli masyarakat cenderung meningkat sehingga perputaran ekonomi daerah menjadi lebih baik.
- b. Indikator persentase capaian SPM Sosial memiliki target **100%** dan realisasi **100%**, sehingga capaian kinerja sebesar **100%** dengan kategori **Baik**. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah prosentase capaian SPM sosial dibagi Jumlah SPM sosial. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan dasar bidang sosial telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** telah terpenuhi secara menyeluruh hak dasarnya. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja adalah Baik dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja SPM Sosial Tahun 2025

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Layanan SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Dilayani	Capaian (%)	Kategori
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	415	415	100	Baik
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	150	150	100	Baik
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	806	806	100	Baik
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	79	79	100	Baik
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	970	970	100	Baik

Sumber: SPM Bangda, 2025

- c. Pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), target Tahun 2025 ditetapkan sebesar **93,55** dengan realisasi sementara sebesar **93,41** (IPG Tahun 2024). Angka ini diperoleh dari rilis BPS dengan sumber perhitungan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) / Proyeksi Penduduk. Angka realisasi yang digunakan masih

menggunakan angka IPG Tahun 2024, dikarenakan sampai laporan ini disusun BPS belum merilis IPG Tahun 2025. Capaian kinerja mencapai **99,85%** dan berada pada kategori **Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan penguatan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya. **Kebijakan dan program daerah perlu semakin responsif gender**, khususnya pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan Perlindungan perempuan dari kerentanan sosial dan ekonomi.

- d. Indikator persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki target **100%** dan berhasil direalisasikan **100%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%** dengan kategori **Baik**. Angka perolehan ini dihitung dari Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani dibagi Jumlah data korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus kekerasan yang terdata telah ditangani sesuai dengan mekanisme dan standar pelayanan yang berlaku serta mencerminkan efektivitas layanan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini semakin terfasilitasi dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, sehingga diharapkan semua kasus yang terjadi dapat dilaporkan dan tertangani dengan baik. Selain itu adanya jaminan keamanan identitas baik bagi pelapor maupun korban. Berikut adalah rekapitulasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak

No	Jumlah Korban Kekerasan yang Teralporkan		Jumlah Korban Kekerasan yang Tertangani		Capaian (%)	
	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan
1	140	49	140	49	100	100

Sumber: UPTD PPA, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah korban kekerasan (anak) yang terlaporkan sebanyak **140 orang** dan tertangani sebanyak **140 orang atau 100%**, sedangkan untuk jumlah korban kekerasan (perempuan) yang terlaporkan sebanyak **49 orang** dan tertangani sebanyak **49 orang atau 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan sehingga korban atau masyarakat berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dan tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap isu-isu kekerasan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Untuk memperoleh gambaran perkembangan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan diperlukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya. Melalui perbandingan ini dapat diketahui kecenderungan capaian kinerja, baik yang mengalami peningkatan, penurunan, maupun stagnasi, sehingga memberikan dasar untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	15,00 - 16,00	16,34	94,86	Baik	14,00 - 15,00	15,71	92,30	Baik	13,50-14,00	13,58	101,25	Sangat Baik
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	%	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00	100,00	Baik
Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak		Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	93,35	93,37	100,02	Sangat Baik	93,45	93,41	99,96	Baik	93,55	93,41*	99,85	Baik
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00	100,00	Baik

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2025

*) angka capaian sementara Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.5 capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten, dengan sebagian besar indikator pada kategori **baik hingga sangat baik**.

Untuk indikator **Tingkat Kemiskinan** yang merupakan indikator negatif, capaian kinerja menunjukkan perbaikan yang signifikan pada Tahun 2025 yaitu dari target 13,50%-14,00% dapat terealisasi 13,58% dengan capaian 101,25%. Jika dilihat dari tren yang ada dari Tahun 2023-2025 rata-rata penanganan kemiskinan di Kabupaten Kebumen adalah 0,63%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan, namun laju penurunannya masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan khususnya dalam bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Perlindungan perempuan dan anak dari risiko sosial ekonomi.

Sementara itu, indikator **persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial** menunjukkan capaian yang konsisten selama periode 2023–2025. Target dan realisasi setiap tahun sama-sama mencapai 100%, dengan capaian kinerja 100% dan kategori baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan dasar bidang sosial telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal secara berkelanjutan sehingga hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar dapat terpenuhi secara menyeluruh. Salah satu unit pelayanan yang terkait dengan pelayanan dasar yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

adanya Rumah Singgah “Dosaraso”. Rumah Singgah ini berfungsi sebagai tempat penampungan dan pemulihan sementara bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, sekaligus sebagai sarana fasilitasi rujukan layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta persiapan reintegrasi sosial secara manusiawi dan berkelanjutan.

Pada indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, capaian kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil. Pada Tahun 2025, realisasi IPG sebesar 93,41 (masih menggunakan realisasi IPG Tahun 2024 karena sampai laporan ini disusun BPS belum rilis IPG Tahun 2025) dari target 93,55 dengan capaian kinerja 99,85% dan tetap berada pada kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender berjalan konsisten meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam capaian tahunan. Jika dilihat tren dari Tahun 2023-2025 rata-rata peningkatan IPG hanya sebesar 0,05% dan tergolong sangat rendah (stagnan). Secara substantif, kenaikan ini menunjukkan **perbaikan yang sangat terbatas** dalam pengurangan kesenjangan gender hasil pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam parlemen belum mencapai 30% sehingga perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Indikator **persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak** menunjukkan kinerja yang sangat stabil selama tiga tahun berturut-turut. Pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025, target dan realisasi sama-sama mencapai 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan kategori baik. Hal ini menandakan bahwa mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berjalan optimal dan berkelanjutan. Seluruh kasus yang dilaporkan dapat tertangani dengan baik. Masyarakat mulai berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mampu menjaga stabilitas dan konsistensi kinerja, serta menunjukkan peningkatan pada indikator strategis tertentu, khususnya pada penurunan tingkat kemiskinan di Tahun 2025. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas program dan layanan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Melalui perbandingan ini, dapat dinilai tingkat kemajuan (*progress*) pencapaian target jangka menengah, mengidentifikasi kesenjangan antara realisasi dan target yang direncanakan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan strategi, serta perbaikan perencanaan dan penganggaran untuk tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
Berkurangnya Penduduk Miskin		Tingkat Kemiskinan	%	13,50-14,00	13,58	101,25	Sangat Baik	13,00-13,50	102,49
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	%	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00
Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak		Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	93,55	93,41*	99,85	Baik	93,65	99,74
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	100,00

Sumber: Dinsos P3A, 2025

*) angka capaian sementara Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, secara umum target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang positif dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir Tahun 2026. Indikator **Tingkat Kemiskinan** pada Tahun 2025 telah mencapai 13,58% yang berada sangat dekat dengan rentang target tahun 2026 sebesar 13,00% –13,50%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang cukup signifikan, meskipun laju penurunannya relatif moderat. Dengan menjaga konsistensi pelaksanaan program, meningkatkan ketepatan sasaran intervensi, serta memperkuat pemberdayaan kelompok rentan miskin target Tingkat Kemiskinan Tahun 2026 sebagai target akhir RPJMD dinilai **realistis untuk dicapai**.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Tahun 2025 telah mencapai 100% dan sesuai dengan target yang ditetapkan hingga Tahun 2026. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan dasar bidang sosial telah dilaksanakan secara optimal dan merata kepada kelompok sasaran. Ke depan, tantangan utama tidak hanya terletak pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data penerima layanan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar capaian SPM dapat dipertahankan secara konsisten. Adapun untuk target Tahun 2026 sebagai akhir RPJMD kemungkinan **dapat dicapai**.

Pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), realisasi tahun 2025 sebesar 93,41 menunjukkan capaian yang sangat mendekati target Tahun 2026 sebesar 93,65. Selisih capaian yang relatif kecil menandakan bahwa target akhir tahun RPJMD sangat berpeluang untuk **tercapai**. Namun demikian, peningkatan IPG yang cenderung berlangsung secara lambat menunjukkan masih

adanya tantangan struktural dalam mewujudkan kesetaraan gender, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan serta peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi.

Sementara itu, indikator penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan hingga Tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan perempuan dan anak telah berjalan dengan baik dan responsif terhadap kasus yang terjadi. Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta penekanan pada upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi dan pemberdayaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian target akhir tahun RPJMD pada Tahun 2026 kemungkinan dapat **tercapai**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 memberikan dasar yang kuat bagi pencapaian target kinerja Tahun 2026. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh konsistensi pelaksanaan program, peningkatan kualitas intervensi kebijakan, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian target pembangunan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi tingkat provinsi dan nasional dimaksudkan untuk memperoleh gambaran posisi dan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam konteks yang lebih luas, sekaligus menilai daya saing dan kontribusi daerah terhadap pencapaian pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja daerah telah sejalan, melampaui, atau masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, sehingga menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan, identifikasi praktik baik (best practices), serta perumusan strategi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan regional dan nasional.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Tujuan	Indikator	Satuan	Kabupaten Kebumen				Provinsi Jawa Tengah	Nasional
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Realisasi	Realisasi
Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,50-14,00	13,58	101,25	Sangat Baik	9,48	8,47
Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	93,55	93,41*	99,85	Baik	93,00*	91,85*

Sumber: Dinsos P3A, 2025

*) angka capaian sementara Tahun 2024 (IPG tahun 2025 belum dirilis oleh BPS)

Berdasarkan Tabel 3.7 realisasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik jika dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada indikator tertentu.

Pada indikator **tingkat kemiskinan**, realisasi Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar **13,58%** telah berada dalam rentang target yang ditetapkan dan menghasilkan capaian kinerja **101,25%** dengan kategori **Sangat Baik**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tingkat kemiskinan **Provinsi Jawa Tengah** sebesar **9,48%** dan **nasional** sebesar **8,47%**, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih relatif lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja daerah telah memenuhi target internal, diperlukan penguatan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan agar kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.

Sementara itu, pada indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, Kabupaten Kebumen mencatat realisasi sebesar **93,41 (IPG Tahun 2024 karena BPS belum rilis IPG Tahun 2025)** dengan capaian kinerja **99,85%** dan kategori **Baik**. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi **Provinsi Jawa Tengah** sebesar **93,00** dan jauh melampaui capaian **Nasional** sebesar **91,85**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kebumen telah berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan.

Secara umum, perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki kinerja yang unggul pada indikator pembangunan gender, namun masih menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan agar sejajar dengan capaian provinsi dan nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa program pendukung strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

a. Program pendukung sasaran strategis Meningkatnya Mutu Layanan Sosial antara lain:

1) Program Pemberdayaan Sosial:

- a) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial.

2) Program Rehabilitasi Sosial:

- a) Rekomendasi Adopsi Anak;
- b) Penyaluran bantuan sosial permukiman bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
- c) Penyaluran bantuan sosial permukiman dan sandang bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis;
- d) Penyaluran alat bantu bagi disabilitas;
- e) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi disabilitas;
- f) Rekomendasi Layanan Rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis;
- g) Rekomendasi Perpanjangan dan Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h) Penyediaan perbekalan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar di luar panti;
- i) Penyediaan permukiman, sandang, bimbingan mental keagamaan dan pemeriksaan kesehatan serta senam bagi Penerima Manfaat Rusi Dosaraso;

- 3) Program Perlindungan Sosial:
 - a) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Rekomendasi Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
 - b) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - c) Konsultasi Bantuan Sosial (PKH dan Sembako);
 - d) Fasilitasi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial.
- 4) Program Penanganan Bencana:
 - a) Fasilitasi Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 - b) Sosialisasi penanganan khusus bagi kelompok rentan dan Tagana Masuk Sekolah;
 - c) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan berbasis masyarakat dan relawan terhadap Kesiapsiagaan Bencana;
 - d) Penyiapan logistik bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Program pendukung sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak antara lain:
 - 1) Program Pengarusutamaan Gender:
 - a) Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - b) Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP);
 - c) Fasilitasi Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - d) Fasilitasi kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan.
 - 2) Program Perlindungan Perempuan:
 - a) Pelayanan UPTD PPA
 - b) Fasilitasi Gelar Kasus Kekerasan Perempuan;
 - c) Rapat Koordinasi Rapat Penanganan Korban Perempuan;
 - d) Fasilitasi Pendampingan Korban Perempuan.

- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga:
 - a) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak:
 - a) Penyusunan Data Pilah Gender (SIGA).
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):
 - a) Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Kawin (DISKA);
 - b) Penyusunan Profil Anak;
 - c) Penyediaan Saksi Ahli dan Tenaga Ahli penanganan kasus;
 - d) Fasilitasi Kegiatan Forum Anak;
 - e) Sosialisai Perlindungan Anak.
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak:
 - a) Pelayanan UPTD PPA
 - b) Fasilitasi Gelar Kasus;
 - c) Fasilitasi Pendampingan Korban Anak.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Atas Capaian Realisasi Kinerja

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
Sosial							
	Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	13,50-14,00	13,58	101,25	Faktor pendorong : - Penyaluran bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti; - Tersedianya pilar-pilar sosial yang menjadi mitra dalam penanganan kesejahteraan sosial.	Upaya Peningkatan : - Terus meningkatkan kevalidan data penerima manfaat bantuan sosial; - Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pilar-pilar kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan terkini.
	Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	100,00	100,00	100,00	Faktor pendorong : - Adanya kerjasama yang baik dengan Dinsos Provinsi Jateng terkait penyediaan logistik dan Rujukan Panti; - Adanya koordinasi yang baik antara Dinsos P3A dengan pemerintah desa dan relawan;	Upaya Peningkatan : - Terus melaksanakan koordinasi dengan Dinsos Prov. Jawa Tengah; - Melakukan monev secara rutin terhadap setiap pelaksanaan kegiatan;

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
P3A							
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55	93,41*)	99,85	Faktor penghambat : - Belum adanya SDM yang terlatih pengarusutamaan gender; - Keterlibatan perempuan dalam parlemen belum mencapai 30%.	Solusi : - Mengundang narasumber dari lembaga yang memiliki SDM yang sudah terlatih PUG dalam bimtek PUG dan PPRG; - Melakukan sosialisasi kepada kelompok Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100,00	100,00	100,00	Faktor Pendorong : - Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan penanganan kasus; - Kerjasama dengan berbagai pihak dari Rumah Sakit, Psikolog, Penasehat Hukum dan Polres.	Upaya Peningkatan : - Terus meningkatkan layanan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat; - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Sumber: Dinsos P3A, 2025

*) Angka sementara capaian 2024

Pada urusan **Sosial**, indikator **Berkurangnya Penduduk Miskin** yang diukur melalui **Tingkat Kemiskinan** menunjukkan capaian yang **melebihi target**, dengan target sebesar 13,50%–14,00% dan realisasi sebesar 13,58% atau capaian 101,25%. Keberhasilan ini didorong oleh optimalnya penyaluran bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti serta tersedianya pilar-pilar sosial yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam penanganan kesejahteraan sosial. Dampak dari capaian ini dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatnya ketahanan sosial keluarga, serta menurunnya potensi kemiskinan ekstrem. Meskipun telah melampaui target, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan dengan terus meningkatkan validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan sosial serta peningkatan kapasitas pilar-pilar kesejahteraan sosial agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Indikator **Meningkatnya Mutu Layanan Sosial** yang diukur melalui **Persentase Capaian SPM Sosial** telah mencapai target 10%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial telah terlaksana secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya kerja sama yang baik dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan logistik dan rujukan panti, serta koordinasi yang efektif antara Dinas Sosial P3A dengan pemerintah desa dan relawan. Dampak terhadap masyarakat terlihat dari meningkatnya akses dan kualitas layanan sosial, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, serta terciptanya rasa aman dan kepastian layanan bagi kelompok rentan. Upaya peningkatan yang perlu dilakukan ke depan antara lain dengan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi

secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan agar mutu layanan tetap terjaga.

Pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)** indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menunjukkan realisasi sebesar 93,41% dari target 93,55% dengan capaian 99,85% sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat capaian ini antara lain belum tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengarusutamaan gender serta keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih belum mencapai 30%. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kesetaraan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya solusi berupa peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan melalui bimbingan teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta peningkatan sosialisasi dan advokasi kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW), guna mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, indikator **Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak** yang diukur melalui **Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak** telah mencapai target 100%. Keberhasilan ini didorong oleh terbentuknya UPTD PPA yang berperan sebagai pusat layanan penanganan kasus serta terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, psikolog, penasihat hukum, dan Polres. Dampak positif dari capaian ini adalah meningkatnya rasa aman bagi perempuan dan anak, meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, serta tersedianya layanan penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi. Meskipun target telah tercapai, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta perluasan sosialisasi agar upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan Sosial dan P3A menunjukkan hasil yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan dan meningkatkan capaian tersebut dengan meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat upaya penurunan kemiskinan dan kesetaraan gender agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

a) Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 214/PMK.02/2017

Tabel 3.9
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2025				Realisasi Anggaran Tahun 2025			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Tujuan										
Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,50-14,00	13,58	101,25	Sangat Baik				
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender(IPG)	Indeks	93,55	93,41*	99,85	Baik				
Sasaran										
Meningkatnya mutu layanan sosial	Prosentase capaian SPM Sosial	%	100	100	100,00	Baik	15.728.596.570,00	14.049.314.116,00	89,32	10,68
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100,00	Baik	941.495.000,00	903.304.038,00	95,94	4,06

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam menghasilkan capaian kinerja. Efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja. dan penetapan target, guna memastikan kesinambungan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Tabel 3.9 secara umum capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Sosial P3A pada Tahun 2025 menunjukkan hasil tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang telah memenuhi bahkan melampaui target, sementara realisasi anggaran berada di bawah pagu yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan pemanfaatan sumber daya anggaran yang optimal.

Efisiensi kinerja di atas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Perencanaan program dan anggaran yang berbasis kebutuhan dan kinerja** dengan penetapan target kinerja yang realistis dan terukur selaras dengan indikator RPJMD dan SPM memungkinkan alokasi anggaran yang proporsional sehingga capaian kinerja dapat diraih tanpa pemborosan anggaran;
2. **Pemanfaatan data yang semakin akurat dan terintegrasi**, khususnya dalam penetapan sasaran penerima manfaat program sosial, berkontribusi terhadap efisiensi anggaran;
3. **Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor** dengan menjalin kerja sama yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, relawan, pilar-

pilar sosial, serta mitra layanan seperti rumah sakit dan aparat penegak hukum, memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan saling melengkapi. Sinergi ini mengurangi kebutuhan anggaran tambahan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program;

4. **Optimalisasi peran UPTD dan pilar layanan sosial** yang aktif di lapangan memungkinkan penanganan kasus dan pelayanan sosial dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga mengurangi biaya operasional yang tidak perlu serta mempercepat pencapaian output dan outcome kegiatan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan yang memerlukan adaptasi terhadap perencanaan awal. Situasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk melakukan penyempurnaan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya agar alokasi anggaran semakin selaras dengan kebutuhan riil dan target kinerja yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja. Pengelolaan anggaran yang baik ini turut memperkuat pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

b) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan gambaran tingkat optimalisasi pemanfaatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi SDM tidak hanya diukur dari jumlah pegawai yang digunakan, tetapi juga dari kesesuaian antara beban kerja, kompetensi, serta waktu kerja dengan output dan outcome yang dihasilkan. Melalui pengelolaan SDM yang tepat, instansi diharapkan mampu mencapai kinerja yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		ABK	KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN
		ASN	PPPK		
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	0
2	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	0
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	0	0	1	-1
5	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	1	0	1	0
6	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	0	1	0
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	0
8	Kepala Subbagian Keuangan	1	0	1	0
9	Penyuluh Sosial Ahli Madya	0	0	4	-4
10	Penyuluh Sosial Ahli Muda	3	0	8	-5

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		ABK	KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN
		ASN	PPPK		
11	Jf Arsiparis Terampil	1	1	3	-1
12	Jf Arsiparis Ahli Pertama	0	0	1	-1
13	Jf Arsiparis Penyelia	0	0	1	-1
14	Jf Arsiparis Mahir	0	0	1	-1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	5	-1
16	Penata laksana barang terampil	0	0	1	-1
17	Pengadministrasian perkantoran	4	2	5	1
18	Operator Layanan Operasional	0	1	19	-18
19	Pengolah Data dan Informasi	0	0	16	-16
20	JF Perencana Ahli Muda	0	0	2	-2
21	JF Perencana Ahli Pertama	0	1	2	-1
22	Penata Layanan Operasional	0	0	1	-1
23	Pekerja Sosial Ahli Muda	0	0	8	-8
24	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	0	10	-9
25	Pekerja Sosial Ahli Madya	0	0	4	-4
26	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1	3	1	3
27	Penyuluh Sosial Ahli Madya	0	0	4	-4
28	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	0	1	-1
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	3	-2
30	Analisis Hukum	0	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		ABK	KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN
		ASN	PPPK		
31	Pengelola P3A	0	0	2	-2
32	Penata Kelola P3A	0	0	3	-3
33	Fasilitator Pemerintahan	1	0	1	0
34	Psikolog	0	0	1	-1
JUMLAH		23	8	116	-85

Sumber: Dinsos P3A, 2025

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.10 kondisi sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya **ketidakseimbangan antara kebutuhan ideal pegawai dengan jumlah pegawai yang tersedia**. Secara keseluruhan, kebutuhan pegawai berdasarkan ABK adalah sebanyak 116 orang, sementara pegawai yang tersedia berjumlah 31 orang yang terdiri dari 23 ASN dan 8 PPPK. Dengan demikian, terdapat **kekurangan SDM sebesar 85 orang**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja dan jabatan fungsional masih belum terpenuhi secara optimal.

Meskipun demikian, kinerja organisasi tetap dapat berjalan dengan baik, yang menunjukkan adanya **tingkat efisiensi pemanfaatan SDM yang cukup tinggi**. Hal ini tercermin dari masih tercapainya target-target kinerja utama meskipun jumlah pegawai jauh di bawah kebutuhan ideal. Kondisi ini didukung oleh optimalisasi pembagian tugas, pelaksanaan kerja lintas fungsi, serta pemanfaatan pegawai yang memiliki multi kompetensi.

Namun demikian, hasil ABK juga menunjukkan kekurangan SDM pada beberapa jabatan seperti Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Pengolah Data dan Informasi, serta Operator Layanan Operasional. Kekurangan pada jabatan-jabatan tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan beban kerja individu, risiko kelelahan kerja, serta keterbatasan jangkauan layanan, terutama dalam pelayanan langsung kepada masyarakat, pendampingan sosial, dan penanganan kasus.

Dari sisi efisiensi, kondisi kekurangan SDM ini mendorong instansi untuk melakukan berbagai penyesuaian, antara lain dengan **mengoptimalkan peran pegawai yang tersedia**, meningkatkan koordinasi internal, serta memanfaatkan dukungan jejaring kerja dengan mitra eksternal dan pilar-pilar sosial. Strategi tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan jumlah pegawai. Namun demikian, hal tersebut perlu diwaspadai agar tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, hasil ABK ini menjadi dasar penting bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan kebijakan penataan SDM ke depan, baik melalui usulan penambahan pegawai, penguatan kapasitas SDM yang ada, maupun optimalisasi dukungan lintas sektor, agar efisiensi yang dicapai dapat bertransformasi menjadi **efektivitas layanan yang berkelanjutan**.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keterkaitan sasaran dengan program/kegiatan pendukung dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Keterkaitan Sasaran Dan Program/Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	13,50- 14,00	13,58	101,25				
Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	Prosentase Capaian SPM Sosial	100,00	100,00	100,00				
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	138,88	Menunjang
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100,00	Menunjang
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	99,52	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	99,43	Menunjang
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia	100,00	Menunjang
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	126,31	Menunjang
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	100,00	Menunjang
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	Menunjang
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	100,00	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100,00	Menunjang
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender(IPG)	93,55	93,41*	99,85				
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	100	100	100,00				
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117,36	Menunjang
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	100,00	Menunjang
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100,00	Menunjang
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	431,15	Menunjang
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100,00	Menunjang
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	100,00	Menunjang
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	100,00	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	280,00	Menunjang

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan keterkaitan antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah **menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**. Hal ini tercermin dari capaian kinerja berbagai indikator program yang berada pada kisaran **100% bahkan melebihi target**. Program-program tersebut berperan penting dalam menjamin kelancaran operasional perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan sosial, serta memastikan keberlangsungan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran **berkurangnya penduduk miskin** didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial serta Program Penanganan Bencana. Indikator seperti persentase peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial dan cakupan perlindungan jaminan sosial yang melampaui target menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan telah berjalan efektif dalam memperkuat kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akses terhadap bantuan dan perlindungan sosial. Selain itu, program rehabilitasi sosial dan program penanganan bencana yang menyasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti dan kelompok rentan juga berkontribusi signifikan dalam menjaga keberlanjutan penanganan masalah sosial secara komprehensif.

Pada sasaran **meningkatnya perlindungan perempuan dan anak**, beberapa program yang menjadi penunjang capaian kinerja antara lain Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak. Tingginya capaian kinerja pada

indikator Cakupan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Jumlah AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan, dan Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dan penguatan kelembagaan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Namun demikian, masih terdapat **indikator strategis tertentu yang belum sepenuhnya mencapai target**, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang realisasinya sedikit berada di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program pendukung telah terlaksana dengan baik, dampak struktural dan jangka panjang terhadap kesetaraan gender masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan akses dan partisipasi perempuan, serta dinamika budaya yang tidak dapat sepenuhnya diintervensi dalam satu periode perencanaan. Hal ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan *output* program belum selalu berbanding lurus dengan capaian *outcome* makro.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah **secara dominan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**, dengan tingkat dukungan yang kuat terhadap sasaran strategis perangkat daerah. Adapun capaian yang belum optimal menjadi bahan evaluasi untuk penguatan perencanaan program yang lebih berorientasi pada outcome, peningkatan kualitas intervensi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor pada periode perencanaan berikutnya agar pencapaian kinerja strategis dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			15.728.596.570	14.049.314.116	1.679.282.454	89,32
	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.860.001.680	3.948.237.497	911.764.183	81,24
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	88.684.000	85.270.730	3.413.270	96,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.416.000	70.089.730	3.326.270	95,47
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.268.000	15.181.000	87.000	99,43
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	3.980.665.000	3.125.385.665	855.279.335	78,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.937.097.000	3.087.638.017	849.458.983	78,42
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.568.000	37.747.648	5.820.352	86,64
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.339.680	110.214.575	10.125.105	91,59
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.065.393	7.220.300	845.093	89,52

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34.088.000	34.088.000	0	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18.591.200	12.775.500	5.815.700	68,72
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.750.000	1.746.000	4.000	99,77
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26.723.087	23.450.275	3.272.812	87,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.122.000	21.122.000	0	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	9.812.500	187.500	98,13
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.651.000	149.342.670	5.308.330	96,57
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	154.651.000	149.342.670	5.308.330	96,57
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.476.000	181.107.348	37.368.652	82,90
	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.079.000	2.071.400	7.600	99,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	157.500.000	120.971.358	36.528.642	76,81

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58.897.000	58.064.590	832.410	98,59
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.186.000	296.916.509	269.491	99,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143.580.000	143.310.509	269.491	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.000.000	25.000.000	0	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128.606.000	128.606.000	0	100,00
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	142.467.000	138.135.186	4.331.814	96,96
7.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	142.467.000	138.135.186	4.331.814	96,96
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.239.000	70.021.493	1.217.507	98,29

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	37.508.000	35.066.908	2.441.092	93,49
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24.880.000	24.420.850	459.150	98,15
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8.840.000	8.625.935	214.065	97,58
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.190.000	3.153.900	36.100	98,87
8.	Pemulangan Warga Negara Migrasi Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	3.190.000	3.153.900	36.100	98,87

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3.190.000	3.153.900	36.100	98,87
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	4.584.893.240	3.898.571.291	686.321.949	85,03
9.	Rehabilitasi terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	4.116.079.940	3.449.939.566	666.140.374	83,82
	Penyediaan Permakanan	jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3.741.745.000	3.080.445.390	661.299.610	82,33
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	93.507.000	90.668.674	2.838.326	96,96
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	66.177.900	64.444.505	1.733.395	97,38

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	187.580.000	187.528.250	51.750	99,97
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.775.900	15.752.297	23.603	99,85
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.294.140	11.100.450	193.690	98,29
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	468.813.300	448.631.725	20.181.575	95,70
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.957.000	8.888.550	68.450	99,24
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	269.730.600	262.844.260	6.886.340	97,45
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	81.329.100	78.388.350	2.940.750	96,38

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	81.802.600	71.516.565	10.286.035	87,43
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	26.994.000	26.994.000	0	100,00
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	5.527.051.400	5.454.166.202	72.885.198	98,68
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	5.527.051.400	5.454.166.202	72.885.198	98,68
	Pengelola Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	124.004.000	115.725.830	8.278.170	93,32
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.403.047.400	5.338.440.372	64.607.028	98,80
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	583.611.500	580.089.640	3.521.860	99,40
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dari Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	522.260.500	518.886.110	3.374.390	99,35

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	187.440.000	185.612.760	1.827.240	99,03
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	78.318.000	77.855.200	462.800	99,41
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	112.050.000	111.756.200	293.800	99,74
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	96.176.500	95.512.750	663.750	99,31
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	48.276.000	48.149.200	126.800	99,74
13.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	61.351.000	61.203.530	147.470	99,76
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	29.328.000	29.250.100	77.900	99,73

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	32.023.000	31.953.430	69.570	99,78
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang Dikelola	27.381.750	26.960.400	421.350	98,46
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang Dikelola	27.381.750	26.960.400	421.350	98,46
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.381.750	26.960.400	421.350	98,46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			941.495.000	903.304.038	38.190.962	95,94
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	360.344.000	355.294.943	5.049.057	98,60
15.	Pelebagaan Pengurusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	53.663.000	52.135.777	1.527.223	97,15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	53.663.000	52.135.777	1.527.223	97,15

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
16.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	306.681.000	303.159.166	3.521.834	98,85
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	306.681.000	303.159.166	3.521.834	98,85
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	74.791.000	71.972.500	2.818.500	96,23
17.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.537.000	31.953.300	583.700	98,21
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.537.000	31.953.300	583.700	98,21
18.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	42.254.000	40.019.200	2.234.800	94,71

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	6.773.000	6.665.200	2.127.000	98,41
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.481.000	33.354.000	2.127.000	94,01
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.636.000	10.377.300	258.700	97,57
19.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.377.300	10.377.300	258.700	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.636.000	10.377.300	258.700	97,57
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	6.805.000	6.560.900	244.100	96,41

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
20.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.805.000	6.560.900	244.100	96,41
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6.805.000	6.560.900	244.100	96,41
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	463.041.000	433.322.295	29.718.705	93,58
21.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	261.706.000	247.031.397	14.674.603	94,39
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	303.394.000	284.631.895	18.762.105	93,82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.641.000	31.614.900	26.100	99,92

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
22.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.006.000	117.075.500	10.930.500	91,46
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.715.000	55.889.475	8.825.525	86,36
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkatdaerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28.382.000	27.218.000	1.164.000	95,90
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	34.909.000	33.968.025	940.975	97,30
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	25.878.000	25.776.100	101.900	99,61
23.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	25.878.000	25.776.100	101.900	99,61

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja Keuangan			Capaian (%)
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang mendapatkan layanan pengaduan	25.878.000	25.776.100	101.900	99,61

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan tabel 3.12 Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan hasil yang **baik**. Dari total anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 16.670.091.570,00** realisasi yang tercapai sebesar **Rp. 14.952.618.154,00** atau sekitar **89,70%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tercapainya capaian kinerja yang memenuhi bahkan melampaui target dengan pemanfaatan sumber daya anggaran yang optimal, yaitu realisasi anggaran dibawah pagu yang telah ditetapkan.

3.3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap berbagai unsur pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur dan mekanisme, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kompetensi dan sikap petugas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas penanganan pengaduan.

Capaian nilai IKM menunjukkan sejauh mana pelayanan publik yang diberikan telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, IKM berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur kepuasan, tetapi juga sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan secara efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebaliknya, apabila masih terdapat unsur pelayanan dengan nilai IKM yang relatif rendah, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah semakin meningkat dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dapat tercapai.

Tabel 3.13
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per 31 Desember 2025

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	22	25%
		Perempuan	66	75%
	Jumlah		88	100%
2	Pendidikan	SD/Sederajat	2	2%
		SMP/Sederajat	39	44%
		SMA/Sederajat	16	18%
		D1/D2/D3	10	11%
		D4/S1	16	18%
		S2/S3	4	5%
		Lainnya	1	1%

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat dianalisis bahwa responden berjumlah 88 orang. Berdasarkan **jenis kelamin**, mayoritas responden adalah **perempuan** sebanyak 66 orang atau **75%**, sedangkan responden **laki-laki** berjumlah 22 orang atau **25%**. Ditinjau dari **tingkat pendidikan**, responden didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan **SMP/ sederajat** sebanyak 39 orang atau **44%**, selanjutnya responden dengan pendidikan **SMA/ sederajat** dan **S2/S3** yang masing-masing berjumlah 16 orang atau **18%**. Selanjutnya, responden berpendidikan **D1/D2/D3** berjumlah 10 orang atau **11%**, **D4/S1** sebanyak 16 orang atau **11%**, serta **SD/ sederajat** sebanyak 2 orang atau **2%**. Sementara itu, kategori pendidikan **lainnya** hanya 1 orang atau **1%**.

Komposisi di atas menunjukkan bahwa layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjangkau masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan relatif inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.

Tabel 3.14
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Jenis Layanan Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	IKM Per Jenis Layanan
1.	Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	8	87.5	84.38	84.38	93.75	84.38	87.5	90.63	90.63	87.5	86,97
2.	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	2	87.5	87.5	87.5	100	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	88
3.	Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
4.	Pelayanan Rekomendasi Bantuan Biaya Kesehatan	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
5.	Konsultasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Bantuan Sosial (PKH dan Sembako)	2	75	75	75	100	75	75	75	62.5	87.5	77
6.	Rekomendasi Adopsi Anak	2	100	100	87.5	100	100	100	100	75	100	94.88
7.	Rehabilitasi PGOT dan ODGJ	7	92.86	92.86	82.14	100	92.86	92.86	92.86	89.29	100	91.93
8.	Rekomendasi Layanan Rujukan bagi ODGJ, Disabilitas	2	75	87.5	75	100	87.5	87.5	87.5	87.5	100	86.63

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	IKM Per Jenis Layanan
9.	Rekomendasi Perpanjangan dan Pendirian LKS	11	93.18	90.91	68.18	95.45	84.09	84.09	88.64	88.64	93.18	86.5
10	Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA)	6	95.83	95.83	95.83	100	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.33
11.	Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Kawin (DISKA)	43	76.16	78.49	77.91	100	76.16	76.74	76.16	76.16	96.51	80.77
Rerata IKM Per Unsur			89.37	90.22	84.86	99.02	89.39	89.73	90.37	86.64	95.28	89.64
IKM Unit Layanan			89,64									
Mutu Unit Layanan			A									

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2025

Berdasarkan Tabel 3.13 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per Jenis Layanan Dinas Sosial P3A per 31 Desember 2025, dapat dianalisis bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah berada pada kategori **sangat baik**. Hal ini tercermin dari nilai **IKM Unit Layanan sebesar 89,64%** dengan **mutu pelayanan A**, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan yang diselenggarakan.

Ditinjau per **jenis layanan**, nilai IKM tertinggi dicapai oleh **Rekomendasi BAZNAS** dan **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Biaya Kesehatan**, masing-masing dengan nilai **99%**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hingga kompetensi dan perilaku petugas, dinilai sangat memuaskan oleh responden. Selanjutnya, **Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA)** serta **Rekomendasi Adopsi Anak** juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai IKM masing-masing 95,33% dan 94,88% hal ini mencerminkan layanan yang responsif dan profesional.

Sementara itu, beberapa layanan memperoleh nilai IKM yang relatif lebih rendah meskipun masih dalam kategori baik, seperti **Konsultasi DTKS dan Bantuan Sosial (77%)**, **Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Kawin/DISKA (80,77%)**, serta **Rekomendasi Perpanjangan dan Pendirian LKS (86,50%)**. Nilai yang lebih rendah pada layanan tersebut terutama dipengaruhi oleh unsur **waktu pelayanan, produk layanan, serta sarana dan prasarana**, yang masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan merata di seluruh jenis layanan.

Berdasarkan **rerata IKM per unsur**, unsur dengan nilai tertinggi adalah **Biaya (99,02%)** dan **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (95,28%)** serta yang menunjukkan bahwa pelayanan diberikan secara transparan, responsif, dan tanpa beban biaya yang memberatkan masyarakat. Sebaliknya, unsur dengan

nilai terendah adalah **Waktu Pelayanan (84,86%)** dan **Sarana dan Prasarana (86,64%)** yang menjadi fokus utama perbaikan ke depan guna meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan. Rendahnya nilai pada unsur waktu menunjukkan bahwa sebagian responden merasa proses pelayanan masih memerlukan waktu yang lebih lama dari standar yang sudah ditentukan. Informasi mengenai durasi layanan belum disampaikan secara jelas, sehingga menimbulkan persepsi ketidakpastian dalam penyelesaian proses pelayanan. Sarana dan prasarana pelayanan di Dinas Sosial P3A Kebumen belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik. Masih perlu fasilitasi untuk penyandang disabilitas yaitu jalur khusus untuk tuna netra yaitu guiding block, selasar landai untuk pengguna kursi roda dan tuna daksa . Untuk pembenahan dibutuhkan anggaran secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil IKM ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun demikian, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada aspek waktu pelayanan dan sarana prasarana, agar kualitas layanan semakin merata dan optimal di seluruh jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, meliputi sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Pengelolaan yang baik terhadap ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan memperhatikan berbagai uraian dan data yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah mampu mencapai seluruh target sasaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut berada pada kategori Baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen.

- 1) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah), indikator Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 adalah sebesar 13,58% dari target 13,50% -14,00%. Capaiannya adalah sebesar 101,25% dari target. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) terealisasi sebesar 93,41% (capaian sementara) dari target 93,55%, atau tingkat capaiannya sebesar 99,85% dari target. Angka IPG ini masih menggunakan capaian Tahun 2024 karena sampai dengan laporan ini disusun, BPS belum merilis IPG Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Untuk IKU OPD, baik untuk IKU Meningkatnya Mutu Layanan Sosial dan IKU Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak capaiannya adalah 100%.

- 2) Total penyerapan anggaran APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp. 14.952.618.154,00 atau 89,70% dari total APBD sebesar Rp. 16.670.091.570,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 14.443.224.128,00 atau 94,08% mengalami penurunan sebesar 4,38%. Akan tetapi, hal ini menjadi pemanfaatan sumber daya anggaran yang optimal dikarenakan target sasaran dapat tercapai meskipun dengan realisasi di bawah pagu yang telah ditetapkan.

4.2. Permasalahan / Kendala

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Berbagai tantangan tersebut turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah

permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan tersebut menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja organisasi, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program dan kegiatan, yang antara lain meliputi:

a. Permasalahan/kendala dalam urusan sosial

1. Kondisi bencana tidak dapat diprediksi dan menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen;
2. Masih banyaknya sumber data yang dikelola untuk penanganan kemiskinan;
3. Penerima Manfaat (PM) merupakan kelompok rentan sehingga menimbulkan resiko penggantian PM;
4. Belum lengkapnya kebutuhan sarana dan prasarana yang tersedia di dalam rumah singgah;

b. Permasalahan/kendala dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak dan perempuan;
2. Masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Kebumen;
3. Belum adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
4. Belum adanya SDM yang definitif dari Kepala UPTD sampai ke petugas pelaksana

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa mendatang antara lain meliputi:

- a. Upaya yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan urusan sosial
 1. Sosialisasi edukasi kebencanaan dapat meluas di warga masyarakat lainnya tidak hanya pada kelompok rentan dan adanya kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), komunitas dan lembaga lainnya terkait penyediaan Logistik;
 2. Optimalisasi pengelolaan data bagi operator desa/kelurahan;
 3. Data yang diusulkan dari desa/kelurahan sudah valid memenuhi kriteria penerima bansos dan koordinasi dengan kecamatan untuk verifikasi dan validasi terkait dengan penggantian data yang tidak masuk kriteria penerima bansos;
 4. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia di rumah singgah.
- b. Upaya yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 1. Terus melakukan sosialisasi agar masyarakat berani melapor dengan harapan semua kasus dilaporkan dan tertangani;
 2. Menurunkan angka perkawinan anak dengan mengoptimalkan konseling keluarga;
 3. Penyediaan anggaran pendampingan anak sebagai pelaku (ABH);
 4. Pengusulan SDM definitif di UPTD PPA.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penilaian serta peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kebumen, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Yunita Prasetyani, SE, MA, M.Ec.Dev.
NIP. 197306141999032003
Pembina Tingkat I - IV/b

LAMPIRAN

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Berkurangnya Penduduk Miskin	13,50-14,00	13,58	101,25					
Meningkatnya Mutu Layanan Sosial	100	100	100,00			15.728.596.570,00	14.049.314.116,00	10,68
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4.860.001.680,00	3.948.237.497,00	18,76
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	88.684.000,00	85.270.730,00	3,85
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.980.665.000,00	3.125.385.665,00	21,49
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	120.339.680,00	110.214.575,00	8,41
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	154.651.000,00	149.342.670,00	3,43

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	218.476.000,00	181.107.348,00	17,10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	297.186.000,00	296.916.509,00	0,09
				Program Pemberdayaan Sosial	138,88	142.467.000,00	138.135.186,00	30,18
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100,00	142.467.000,00	138.135.186,00	3,04
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00	3.190.000,00	3.153.900,00	1,13

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100,00	3.190.000,00	3.153.900,00	1,13
				Program Rehabilitasi Sosial	99,52	4.584.893.240,00	3.898.571.291,00	14,56
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	99,43	4.116.079.940,00	3.449.939.566,00	15,70
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100,00	468.813.300,00	448.631.725,00	4,30

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	126,31	5.527.051.400,00	5.454.166.202,00	21,87
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.527.051.400,00	5.454.166.202,00	1,32
				Program Penanganan Bencana	100,00	583.611.500,00	580.089.640,00	0,60
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100,00	522.260.500,00	518.886.110,00	0,65
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100,00	61.351.000,00	61.203.530,00	0,24
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00	27.381.750,00	26.960.400,00	1,54
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100,00	27.381.750,00	26.960.400,00	1,54

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	93,55	93,41*	99,85					
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	100	100	100,00			941.495.000,00	903.304.038,00	4,06
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	117,36	360.344.000,00	355.294.943,00	15,99
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	53.663.000,00	52.135.777,00	2,85

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	306.681.000,00	303.159.166,00	1,15
				Program Perlindungan Perempuan	100,00	74.791.000,00	71.972.500,00	3,77
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	32.537.000,00	31.953.300,00	1,79
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	42.254.000,00	40.019.200,00	5,29
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	431,15	10.636.000,00	10.377.300,00	77,37

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	10.377.300,00	10.377.300,00	0,00
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100,00	6.805.000,00	6.560.900,00	3,59
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	6.805.000,00	6.560.900,00	3,59
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100,00	463.041.000,00	433.322.295,00	6,42
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	261.706.000,00	247.031.397,00	5,61

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	128.006.000,00	117.075.500,00	8,54
				Program Perlindungan Khusus Anak	100,00	25.878.000,00	25.776.100,00	0,39
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280,00	25.878.000,00	25.776.100,00	64,43

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A. M.Ec.Dev
Jabatan : Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.ec.Dev
Pembina Tk I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Plt KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55	93,55				93,55
	Sasaran :								
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100				100
	Tujuan :								
2	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	13,50 – 14,00	13,50 – 14,00				13,50 – 14,00
	Sasaran :								
	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	%	100	100				100

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.925.560.000,-	Rp. 4.860.001.680,-	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 188.372.000,-	Rp.142.467.000,-	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.190.000,-	
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.665.779.000,-	Rp. 4.584.893.240,-	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.544.681.400,-	Rp. 5.527.051.400,-	
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 657.347.000,-	Rp. 583.611.500,-	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 27.535.000,-	Rp. 27.381.750,-	
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 421.385.000,-	Rp. 360.344.000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
9.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 93.756.000,-	Rp. 74.791.000,-	
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 14.636.000,-	Rp. 10.636.000,-	
11.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 7.415.000,-	Rp. 6.805.000,-	
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 252.772.000,-	Rp. 463.041.000,-	
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 31.646.000,-	Rp. 25.878.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.ec.Dev
Pembina Tk I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julin, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791221 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Program								
A	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				100



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.925.560.000,-	Rp.4.860.001.680,-	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 108.070.000,-	Rp. 88.684.000,-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.985.073.000,-	Rp. 3.980.665.000,-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 151.654.000,-	Rp. 120.339.680,-	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 154.901.000,-	Rp. 154.651.000,-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 228.676.000,-	Rp. 218.476.000,-	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 297.186.000,-	Rp. 297.186.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791221 199912 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Misparini Hayuningtyas, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Julin, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19791221 199912 1 001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Misparini Hayuningtyas, S.E
Penata Tk I

NIP. 19740613 199603 2 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
1	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	32
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp. 3.985.073.000,-	Rp. 3.980.665.000,-	
1	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.937.097.000,-	Rp. 3.937.097.000,-	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 47.976.000,-	Rp. 43.568.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19791221 199912 1 001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Misparini Hayuningtyas, S.E
Penata Tk I / III d
NIP. 19740613 199603 2 001

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arum Dwi Lestariningsih, S.Kep, M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Julin, S.STP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19791221 199912 1 001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arum Dwi Lestariningsih, S.Kep, M.M
Pembina

NIP. 19800514 200012 2 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	18	18	9		5	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	6		3	2
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	3		2	2
	Tersedianya bulan penyediaan administrasi daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2	2	2	2	2	2
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor	Bulan	12	12	3	3	3	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	3	3	3	3
4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	2	2	2	2	2	2
5	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan / Material	Bulan	12	12	3	3	3	3
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	36	36	9	9	9	9
7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Operasional Penanganan Arsip	Bulan	12	12	3	3	3	3
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	6			6	
1	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	6			6	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	3	3	3	3
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	3	3	3	3
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	3	3	3	3
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	97	97	14	23	28	32
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Unit	53	53	7	13	9	24
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	41	41	6	9	18	8



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
3	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	3	3	1	1	1	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 108.070.000,-	Rp. 88.684.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 90.772.000,-	Rp. 73.416.000,-	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.298.000,-	Rp. 15.268.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 151.654.000,-	Rp. 120.339.680,-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 8.065.393,-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 38.088.000,-	Rp. 34.088.000,-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.657.000,-	Rp. 18.591.200,-	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-	
5	Penyediaan Bahan / Material	Rp. 29.784.000,-	Rp. 26.723.087,-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 42.375.000,-	Rp. 21.122.000,-	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 154.901.000,-	Rp. 154.651.000,-	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 154.901.000,-	Rp. 154.651.000,-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 228.676.000,-	Rp. 218.476.000,-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.079.000,-	Rp. 2.079.000,-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Rp. 157.500.000,-	Rp. 157.500.000,-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 69.097.000,-	Rp. 58.897.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 297.186.000,-	Rp. 297.186.000,-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp. 143.580.000,-	Rp. 143.580.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 128.606.000,-	Rp. 128.606.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Julin, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19791221 199912 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arum Dwi Lestariningsih, S.Kep, M.M
Pembina / IV a
NIP. 19800514 200012 2 006

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heny Setyowati, S.E, Ak, M.Ak
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heny Setyowati, S.E, Ak, M.Ak
Pembina
NIP. 19751231 200312 2 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Program								
A	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	%	72	72				72
	Kegiatan								
1	Terlaksananya Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kegiatan	4	4				4
	Program								
B	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	%	80,27	80,27				80,27
	Kegiatan								
1	Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	Kecamatan	26	26				26
	Program								
C	Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	%		100				100
	Kegiatan								



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
1	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dengan baik	Jumlah TMP yang di kelola	Unit	1	1				1

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
.	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 188.372.000,- Rp. 188.372.000,-	Rp. 142.467.000,- Rp. 142.467.000,-	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 88.968.000,-	Rp. 71.239.000,-	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 60.074.000,-	Rp. 37.508.000,-	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 29.330.000,-	Rp. 24.880.000,-	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.840.000,-	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 136.634.000,-	Rp. 124.004.000,-	
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 5.408.047.400,-	Rp. 5.403.047.400,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 27.535.000,-	Rp. 27.381.750,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Rp. 27.535.000,-	Rp. 27.381.750,-	
1	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 27.535.000,-	Rp. 27.381.750,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Penanganan
Kemiskinan dan Pemberdayaan
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heny Setyowati, S.E. Ak, M. Ak
Pembina
NIP. 19751231 200312 2 008

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Liftyawati Anggraeni, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Liftyawati Anggraeni, S.E
Pembina
NIP. 19701208 199803 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Program								
A	Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100				100
	Kegiatan								
1	Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran ke desa/kelurahan asal	Jumlah migran yang diberikan fasilitas pemulangan	Orang	3	3				3
	Program								
B	Meningkatnya Penanganan bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100				100



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Kegiatan								
1	Terlaksananya pemberian bantuan logistik permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam/sosial dan penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kegiatan	5	5				5
2	Terlaksananya Pelayanan kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Kegiatan	2	2				2

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.190.000,-	
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.190.000,-	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.190.000,-	
	Program Penanganan Bencana	Rp. 657.347.000,-	Rp. 583.611.500,-	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 558.101.000,-	Rp. 522.260.500,-	
1	Penyediaan Makanan	Rp. 192.580.000,-	Rp. 187.440.000,-	
2	Penyediaan Sandang	Rp. 79.313.000,-	Rp. 78.318.000,-	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp 125.733.000,-	Rp. 112.050.000,-	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 109.209.000,-	Rp. 96.176.500,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 51.266.000,-	Rp. 48.276.000,-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 99.246.000,-	Rp. 61.351.000,-	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 43.028.000,-	Rp. 29.328.000,-	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 56.218.000,-	Rp. 32.023.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Liftyawati Anggraeni, S.E
Pembina
NIP. 19701208 199803 2 002

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Seha Rahayu, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dra. Seha Rahayu, M.M
Pembina
NIP. 19671130 199303 2 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Program								
A	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	100	100				100
	Kegiatan								
1	Terlayannya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Orang	11422	1908				1908
2	Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Kegiatan	5	5				5

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
.	Program Rehabilitas Sosial	Rp. 4.665.779.000,-	Rp. 4.584.893.240,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.170.500.000,-	Rp. 4.116.079.940,-	
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 3.774.145.000,-	Rp. 3.741.745.000,-	
2	Penyediaan Sandang	Rp. 95.067.000,-	Rp. 93.507.000,-	
3	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 66.752.000,-	Rp. 66.177.900,-	
4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar	Rp. 190.000.000,-	Rp. 187.580.000,-	
5	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 27.942.000,-	Rp. 15.775.900,-	
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 16.594.000,-	Rp. 11.294.140,-	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp. 495.279.000,-	Rp. 468.813.300,-	
1	Pemberian Layanan Data Pengaduan	Rp. 14.722.000,-	Rp. 8.957.000,-	
2	Penyediaan Permakanan	Rp. 275.000.000,-	Rp. 269.730.600,-	
3	Penyediaan Sandang	Rp. 90.000.000,-	Rp. 81.329.100,-	
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 82.273.000,-	Rp. 81.802.600,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
5	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 33.284.000,-	Rp. 26.994.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dra. Seha Rahayu, M.M
Pembina
NIP. 19671130 199303 2 004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Sri Fatmahwati, M. Sc
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

dr. Sri Fatmahwati, M. Sc
Pembina
NIP. 19700625 200212 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Program								
A	Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Cakupan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	18,38	18,38				18,38
	Kegiatan								
1	Pelebagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelebagaan PUG	Kegiatan	3	3				3
2	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan	2	2				2
	Program								
B	Meningkatkan Perlindungan perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan								
1	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kegiatan	2	2				2
2	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban	Kegiatan	2	2				2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota							
	Program								
C	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	18,36	18,36				18,36
	Kegiatan								
1	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/kota	Kegiatan	2	2				2
	Program								
D	Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100	100				100
	Kegiatan								
1	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1				1
	Program								
E	Meningkatnya pemenuhan Hak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya/ Nindya	Madya	Madya				Madya
	Kegiatan								
1	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non	Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga	Kegiatan	3	3				3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
						I	II	III	IV
	pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota							
2	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan	3	3				3
	Program								
F	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan								
1	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan	1	1				1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 421.385.000,-	Rp. 360.344.000,-	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 71.385.000,-	Rp. 53.663.000,-	
1	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Rp. 71.385.000,-	Rp. 53.663.000,-	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 350.000.000,-	Rp. 306.681.000,-	
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp. 350.000.000,-	Rp. 306.681.000,-	
	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 93.756.000,-	Rp. 74.791.000,-	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Rp. 46.475.000,-	Rp. 32.537.000,-	
1	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.475.000,-	Rp. 32.537.000,-	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 47.281.000,-	Rp. 42.254.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Rp. 7.259.000,-	Rp. 6.773.000,-	
2	Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 40.022.000,-	Rp. 35.481.000,-	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 14.636.000,-	Rp. 10.636.000,-	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.636.000,-	Rp. 10.636.000,-	
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 14.636.000,-	Rp. 10.636.000,-	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 7.415.000,-	Rp. 6.805.000,-	
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.415.000,-	Rp. 6.805.000,-	
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 7.415.000,-	Rp. 6.805.000,-	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 252.772.000,-	Rp. 463.041.000,-	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 107.886.000	Rp. 335.035.000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Rp. 72.402.000,-	Rp. 303.394.000,-	
2	Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Rp. 35.484.000,-	Rp. 31.641.000,-	
1	Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Rp. 114.886.000,-	Rp. 128.006.000,-	
2	Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Rp. 68.732.000,-	Rp. 64.715.000,-	
3	Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.535.000,-	Rp. 28.382.000,-	
		Rp. 41.619.000,-	Rp. 34.909.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 31.646.000,-	Rp. 25.878.000,-	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Rp. 31.646.000,-	Rp. 25.878.000,-	
1	Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.646.000,-	Rp. 25.878.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yunita Prasetyani, S.E, M.A, M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 19730614 199903 2 003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

dr. Sri Fatmahwati, M. Sc
Pembina
NIP. 19700625 200212 2 003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara